

toleransi, kesamarataan, kemandirian dan seterusnya. Dengan masih kuatnya nilai kepercayaan dan tanggung jawab publik misalnya, maka akan dapat dikekang sikap keserakahan individual yang dicoba untuk dikembangkan oleh sistem ekonomi pasar melalui konsumerisme. Dengan diperkuatnya nilai toleransi dan kesamarataan, maka akan dapat dikontrol kehendak eksploitatif yang menjadi motor kapitalisme.

Keberadaan *civil society* di dalam rakyat modern tentu tak lepas dari hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural inheren di dalamnya. Komponen pertama termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, dan keberadaan organisasi-organisasi kepentingan dalam rakyat. Pada saat yang sama, *civil society* akan berkembang dan menjadi kuat apabila komponen-komponen kultural yang menjadi landasannya juga kuat. Komponen tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak berbicara dan berorganisasi, sikap toleran antar individu dan kelompok dalam rakyat, adanya tingkat kepercayaan publik (*publik trust*) yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok.

Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tubuh pada masyarakat

Pemikir politik terpenting abad ke XX berkebangsaan Italia Antonio Gramsci (1891-1937) mengemukakan gagasannya tentang hegemoni yang merupakan landasan alternatif terhadap teori Marxis. Pandangan Gramsci mengenai masyarakat madani memiliki kesamaan dengan gerakan sosial, bagi Gramsci di zamannya terjadi konfliktual dan dialektika antara “negara” (*state*) dan “masyarakat madani” (*civil society*) dalam analisisnya tentang supremasi dan hegemoni sementara yang lain (negara) merupakan arena publik yang dikontrol melalui hegemoni oleh kekuasaan negara. Bagi Gramsci masyarakat madani adalah suatu dunia dimana rakyat membuat perubahan dan sejarah masa depan masyarakat mereka.

Kehadiran masyarakat madani yang kuat akan menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan negara, dan negara harus menyediakan tempat bagi eksisnya masyarakat madani. Negara tidak mempunyai alasan untuk mendikte masyarakat agar mau mengikuti kehendaknya, karena kehadiran masyarakat madani merupakan entitas yang terlepas dari pengaruh negara (*political society*). Antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) harus terjadi *check and balance* dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis. Dalam sistem demokratis, pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, tunduk dan taat serta patuh kepada hukum, dengan berpegang pada keadilan dan kepatuhan dan tunduk kepada hukum kehidupan bernegara

biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan bertentangan dengan sebagian rakyat.⁹ Antony Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif, sedangkan Mansoer Fakhri menyatakan bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial.

Macionis menyatakan bahwa sosial movement adalah aktivitas yang diorganisasikan yang di tujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial, dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang di kemukakan *macionis* tersebut, maka dapat di garis bawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni adanya aktivitas yang di organisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan.

Spencer berpendapat bahwa yang di maksud *sosial movement* adalah upaya kolektif yang di tujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru ciri utama dari pandangan spencer adalah adanya upaya kolektif bersama dan upaya tersebut di arahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi dari tatanan yang ada.

⁹ Juwono Sudarsono, *Pembangunan dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia,1976), 24-25.

menghindari koopatasi dari pemegang kekuasaan yang otoritarian dalam hal ini aktor gerakan sosial secara sadar memutuskan untuk mengisolasi diri atau menghindari hubungan dengan agen-agen Negara. Ruang untuk mengisolasi diri biasanya di temukan di tingkat lokal di mana aktor berbasis komunitas aktif dalam rangka mengembangkan atau mengorganisasikan kelompok sosial berdasarkan sumber daya lokal.

- b. Strategi pelapisan (*Layering*) Strategi ini sangat sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di Negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. pelapisan adalah pengembangan penyediaan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisikan metode dan aktivitas yang berorientasi pemberdayaan dan transformasi sosial dengan melakukan strategi ini organisasi gerakan sosial bisa menghindarkan diri dari aksi intervensi langsung dari pihak lawan-lawan . pihak lawan atau pihak-pihak di luar organisasi. organisasi gerakan sosial melihatnya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
- c. Strategi Advokasi sebagaimana dijelaskan oleh Suharto , bahwa strategi advokasi atau yang biasa di sebut pendampingan ini merupakan strategi utama yang di gunakan oleh kalangan NGO baik di Negara-negara maju maupun di Negara-Negara berkembang, strategi advokasi seringkali di gunakan untuk mendesakkan perubahan-perubahan sosial seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumber daya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan menciptakan dan memelihara perdamaian di daerah-daerah rawan konflik. Strategi advokasi

